

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024) : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan fokus pada pengembangan masing-masing wilayah di Indonesia, terutama sebagai mitigasi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga sangat penting. Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan major project di semua wilayah pada tahun 2022, maka secara nasional pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,4 – 6,0 persen; Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,5 – 6,2 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,5 – 9,0 persen; Nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,376 – 0,378. Sementara pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 26,8 – 27,1%; Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2022 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,44 – 73,48; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 102 – 104, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 102 – 105.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kali ini. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa major project. Dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2022, maka investasi akan menjadi salah satu kunci, karena investasi mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2022.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2022 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat setelah pandemi berakhir melalui upaya pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat, sehingga faktor – faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 di proyeksikan pada kisaran 3,93-5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi **3,5 %** dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sampai diangka **-1,46%**. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2020 jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih lebih baik. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2022 guna mendukung target pertumbuhan sebesar **3,5 %** untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid-19 diarahkan

pada **Penguatan dan Transformasi Sosial - Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur yang Didukung Pemerintahan yang Profesional** melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada hakikatnya merupakan komponen pendukung, pembentuk atau penyumbang PDRB. Bila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi $(Y) = \text{Konsumsi } (C) + \text{Investasi } (I) + \text{Belanja Pemerintah } (G) + (\text{Ekspor-Impor } /X-M)$, maka komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal selama periode 2011-2016 yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 85-90 persen, Ekspor juga mempunyai peran yang besar, karena sekitar 57-73 persen produk Kabupaten Tegal mampu menembus pasar internasional dan antar daerah.

Demikian juga dengan impor, karena 73,35 % permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk capital/investasi (PMTB) juga mempunyai peran dengan kontribusi sekitar 25,04%. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Sejak 2015 agregasi ekonomi Kabupaten Tegal telah menembus level di atas 25 triliun rupiah. Pada tahun 2019, nilai ekonomi Kabupaten Tegal mencapai Rp. 35,231 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor. Sayangnya ekonomi Kabupaten Tegal masih tergerus dengan tingginya impor yang besarnya sampai dengan tahun 2019 masih di atas ekspor Kabupaten Tegal. Bersyukur sebagian impor merupakan barang modal dan bahan baku sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomimelalui penciptaan *value added*.

Dampak pandemi yang disebabkan oleh covid-19 masih terasa sampai akhir tahun 2020. Komponen penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal belum berfungsi seperti biasanya. Komponen Impor Barang dan Jasa berkontraksi paling dalam. Walaupun berkontraksi komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang PDRB menjadikan kontraksi agregat lebih terkendali.

Proyeksi Perekonomian Daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

NO	Indikator	Target	
		2021	2022
1.	PDRB/PDB :		
	a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	36.450,07	37.725,82
	b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)	25.286,70	26.171,73
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,2%	3,5%
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku	22,78	23,43

NO	Indikator	Target	
		2021	2022
5.	a. Nilai Investasi PMA	500 Miliar	520 Miliar
	b. Nilai Investasi PMDN	850 Miliar	875 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	10,42	9,53
7.	Kemiskinan (persen)	8,41	8,21

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2014, 2021

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 - 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 - 2022

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	2021	2022
1. Konsumsi RumahTangga	2,45	3,65
2. Konsumsi LNPRT	3,32	4,32
3. Konsumsi Pemerintah	1,46	2,54
4. PMTB	0,38	1,32
5. Perubahan Inventori	3,53	4,65
6. Ekspor	2,24	3,24
7. Import	0,19	1,25

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 *) Proyeksi

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2021 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022

Lapangan Usaha/Industry		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,33	2,75
B	Pertambangan dan Penggalian	2,25	2,54
C	Industri Pengolahan	1,45	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,23	2,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,35	3,40
F	Konstruksi	-0,67	1,80

Lapangan Usaha/Industry		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,56	2,75
H	Transportasi dan Pergudangan	2,32	3,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	4,50
J	Informasi dan Komunikasi	15,23	17,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,55	3,54
L	Real Estate	1,25	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,35	2,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	2,46
P	Jasa Pendidikan	1,34	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,24	6,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,2	4,53

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 *) Proyeksi

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. **Tantangan** ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Penanganan pandemi virus covid-19 belum lah usai. Hampir seluruh daerah bahkan negara harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Meskipun bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap daerah masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang terkontraksi sebagai konsekuensi penanganan pandemi. Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak daerah yang sudah mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak daerah kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, ditambah dengan adanya implementasi vaksinasi. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi setidaknya ada celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat. Hanya saja, pemulihan perekonomian diperkirakan berjalan lambat lantaran masa depan penanganan pandemi belum benar-benar jelas. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru virus. Perekonomian kawasan, regional dan nasional diperkirakan baru akan kembali ke level sebelum pandemi pada 2022 atau 2023, dengan catatan efektivitas vaksin benar-benar terjadi yang mempengaruhi percepatan pemulihan.

2. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.

3. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

4. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

5. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.

6. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah di Kabupaten Tegal dapat merasa *mbetahi* dan *ngangeni*.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potens sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Tercatat sebesar 53,18 persen penduduk yang usia 15 tahun ke atas. Angka yang cukup besar.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampaui jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampaui jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2022 sesuai dengan target sebesar 5,53% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal selesai tahun 2020 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Sementara arah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian, industri dan perdagangan.

2. Meningkatkan Konsumsi Masyarakat

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan Kemiskinan

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein

Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. Mendorong Konsumsi Karbohidrat dan Protein

Selain ketersediaan, konsumsi karbohidrat dan protein menjadi perhatian pemerintah yang akan difasilitasi melalui program dan kegiatan. Kampanye dan penyediaan bahan pangan karbohidrat dan protein telah menjadi agenda pemerintah daerah.

9. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Usaha Tani, Perdagangan)

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

10. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

11. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

12. Meningkatkan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

13. Merintis Skema Pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership (PPP)*

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KBPU. Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana

Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2022 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)

- a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Optimalisasi pengelolaan objek-objek dengan pihak ketiga yang telah kembali kepada pemerintah daerah (pasar trayeman, pasar banjaran, aset-aset diobjek wisata guci).
- c. Optimalisasi penarikan pajak jalan tol dan depo pertamina munjung agung.
- d. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
- e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
- f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- g. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
- h. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dimana Kabupaten Tegal terdampak *corona virus disease 2019 (covid-19)* dan masih dalam masa pemulihan dari pandemi covid-19, baik pemulihan ekonomi, pemulihan sosial maupun pemulihan kesehatan. Hal ini mempengaruhi kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2022 sebagai dampak dari pandemi covid-19 yang mengakibatkan pendapatan asli daerah belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2022 terutama dari sektor pajak dan retribusi tidak banyak mengalami kenaikan dari proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2021 akibat dampak dari pandemi covid-19 yang disebabkan beberapa sektor yang menjadi penyokong utama pendapatan asli daerah berjalan lambat atau cenderung stagnan yang menjadi salah satu penyumbang penurunan pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)

- a. Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (*Term Of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- e. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan e-government. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah dan indeks pencegahan korupsi. Selain itu, DID dapat diberikan dalam rangka mendapatkan penilaian penghargaan dari kementerian/teknis.
- f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, Pendapatan Transfer menempati porsi terbesar diikuti PAD dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2021 pendapatan daerah mengalami penyesuaian sesuai amanat dari PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya. Penurunan alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU mengalami penurunan dari semula sebesar Rp1.112.675.840.000,00 menjadi Rp1.077.039.778.000,00 sedangkan DAK mengalami penurunan dari semula Rp463.620.414.000,00 menjadi Rp443.042.718.000,00. Sedangkan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan alokasi.

Pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.590.720.916.000,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp436.954.456.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.002.436.660.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp151.329.800.000,00. Target PAD diproyeksikan meningkat sebesar Rp3.131.536.000,00 dari PAD tahun 2021 dengan harapan sektor-sektor yang menjadi sumber PAD sudah membaik pada masa pemulihan covid-19. Peningkatan PAD ada pada peningkatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan transfer tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp183.367.343.000,00 dari pendapatan transfer tahun 2021. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dialokasikan mendasari Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 untuk TKDD tahun 2021 sebagai dampak pandemi covid-19. Akan tetapi, proyeksi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya bersumber dari DAK Non Fisik dengan pertimbangan alokasi tersebut rutin diterima oleh Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan bersumber dana dari DAK Fisik tetap diusulkan oleh perangkat daerah melalui aplikasi KRISNA. Selanjutnya pendapatan transfer antardaerah yang bersumber dari pendapatan

bantuan keuangan dari provinsi terdapat pengecualian. Proyeksi pendapatan bantuan keuangan dari provinsi tidak tercantum dalam proyeksi pendapatan tahun 2022 dikarenakan belum jelasnya program dan alokasi dari Pemerintah Provinsi. Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 diproyeksikan turun sebesar Rp500.000.000,00 dari alokasi tahun 2021 sebesar Rp151.329.800.000,00.

Kinerja keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan APBD tahun 2021 sebagai dampak pandemi covid-19 serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 dan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Tahun						Proyeksi/ Target 2022	Proyeksi/Target 2023
		R 2018	R 2019	R 2020	2021*)	2021**)			
1	PENDAPATAN	2.523.434.958.171	2.755.677.484.152	2.651.771.838.698	2.771.456.723.000	2.751.185.210.000	2.590.720.916.000	2.757.091.565.000	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	371.345.954.411	436.003.392.413	439.931.567.175	433.822.920.000	469.765.165.000	436.954.456.000	439.455.762.000	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	107.035.473.258	122.808.450.157	125.236.006.697	133.050.000.000	133.050.000.000	133.365.000.000	134.823.500.000	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	17.833.906.345	25.207.739.921	19.290.694.924	23.583.855.210	22.447.114.315	26.112.391.000	27.155.197.000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.576.924.389	22.395.196.773	14.185.195.523	13.470.000.000	15.417.021.000	13.758.000.000	13.758.000.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	233.899.650.419	265.592.005.562	281.219.670.031	263.719.064.790	298.851.032.000	263.719.065.000	263.719.065.000	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.008.586.726.208	2.178.562.532.180	2.056.187.505.939	2.185.804.003.000	2.129.590.245.000	2.002.436.660.000	2.165.806.003.000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.830.906.493.271	1.927.627.217.336	1.900.438.144.445	1.984.603.809.000	1.928.390.051.000	1.821.236.466.000	1.984.603.809.000	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	29.421.275.289	22.161.572.062	36.287.432.768	30.110.971.000	30.110.971.000	30.110.971.000	30.110.971.000	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.144.494.182.000	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	1.112.675.840.000	1.077.039.778.000	1.112.675.840.000	1.112.675.840.000	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	339.287.872.985	365.945.635.277	354.722.997.677	463.620.414.000	443.042.718.000	300.253.071.000	463.620.414.000	
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	35.000.000.000	44.577.009.000	64.411.379.000	18.742.708.000	18.742.708.000	18.742.708.000	18.742.708.000	
1.2.1.5	Dana Desa	282.703.162.997	340.958.368.997	358.311.953.000	359.453.876.000	359.453.876.000	359.453.876.000	359.453.876.000	
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	177.680.232.937	206.358.305.844	155.749.361.494	201.200.194.000	201.200.194.000	181.200.194.000	181.202.194.000	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	167.207.542.937	173.568.253.580	151.186.151.494	181.202.194.000	181.202.194.000	181.200.194.000	181.202.194.000	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.472.690.000	32.790.052.264	4.563.209.000	19.998.000.000	19.998.000.000	0	0	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	143.502.277.552	141.111.559.559	155.652.766.584	151.829.800.000	151.829.800.000	151.329.800.000	151.829.800.000	
1.3.1	Pendapatan Hibah	143.502.277.552	141.111.559.559	155.652.766.584	6.500.000.000	6.500.000.000	6.000.000.000	6.500.000.000	
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	145.329.800.000	145.329.800.000	145.329.800.000	145.329.800.000	
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan :

*) APBD Penetapan Tahun 2021

**) Proyeksi/Target Perubahan APBD Tahun 2021

Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Proporsi pendapatan transfer dari tahun 2018 sampai dengan proyeksi tahun 2023 masih diatas 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah daerah sangat bergantung dari pemerintah pusat.

Tabel 3.5 Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	R.2018	R.2019	R.2020	2021*)	2021**)	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	14,72	15,82	16,59	15,65	15,77	16,87	15,94
2	Pendapatan Transfer	79,60	79,06	77,54	78,87	77,41	77,29	78,55
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5,68	5,12	5,87	5,48	5,52	5,84	5,51

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan :

*) APBD Penetapan Tahun 2021

***) Proyeksi/Target Perubahan APBD Tahun 2021

Pendapatan daerah sebelum adanya pandemi covid-19 cenderung mengalami kenaikan. Dengan adanya pandemi covid-19 yang mulai terjadi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini beberapa komponen pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Akan tetapi, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2019 - 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 0,29%. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,25%, dimana dari komponen pendapatan asli daerah hanya dari pendapatan pajak daerah yang mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,09% sedangkan untuk komponen pendapatan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan.

Sedangkan dari pendapatan transfer mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,17%. Pendapatan transfer pemerintah pusat naik sebesar 0,31%, dimana pendapatan DBH, DAK dan Dana Desa mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,56%, 12,56% dan 2,68%. Pendapatan transfer pemerintah daerah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,26%.

Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2021

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.755.677.484.152	2.651.771.838.698	2.771.456.723.000	0,29
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.003.392.413	439.931.567.175	433.822.920.000	(0,25)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	122.808.450.157	125.236.006.697	133.050.000.000	4,09
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.207.739.921	19.290.694.924	23.583.855.210	(3,27)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.395.196.773	14.185.195.523	13.470.000.000	(22,45)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	265.592.005.562	281.219.670.031	263.719.064.790	(0,35)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.178.562.532.180	2.056.187.505.939	2.185.804.003.000	0,17
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.927.627.217.336	1.900.438.144.445	1.984.603.809.000	0,31
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	22.161.572.062	36.287.432.768	30.110.971.000	16,56
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.198.561.641.000	1.086.704.382.000	1.112.675.840.000	(3,65)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	365.945.635.277	354.722.997.677	463.620.414.000	12,56
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	44.577.009.000	64.411.379.000	18.742.708.000	(35,16)
1.2.1.5	Dana Desa	340.958.368.997	358.311.953.000	359.453.876.000	2,68

No	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	206.358.305.844	155.749.361.494	201.200.194.000	(1,26)
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	173.568.253.580	151.186.151.494	181.202.194.000	2,18
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	32.790.052.264	4.563.209.000	19.998.000.000	(21,91)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.111.559.559	155.652.766.584	151.829.800.000	3,73
1.3.1	Pendapatan Hibah	141.111.559.559	155.652.766.584	151.829.800.000	3,73
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan :

*) APBD Penetapan Tahun 2021

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah tahun 2022 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Struktur belanja daerah tahun 2022 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk didalamnya alokasi untuk penanganan dan pemulihan paska pandemi covid-19.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja hibah tahun 2022 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2022 diantaranya untuk menangani masalah sosial dan kemsikinan.
 - e. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk pos komando tingkat kelurahan, insentif tenaga kerja dan belanja kesehatan lainnya pada masa pandemi covid-19.
2. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
5. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.

6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi :

1. Industri;
2. Pariwisata;
3. Ketahanan Pangan;
4. UMKM;
5. Infrastruktur;
6. Transformasi Digital;
7. Pembangunan Rendah Karbon;
8. Reformasi Perlindungan Sosial;
9. Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan; dan
10. Reformasi Kesehatan.

Pada APBD tahun 2021 kembali dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan pendampingan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial serta pendampingan vaksinasi covid-19. Dengan adanya *refocusing* anggaran tersebut, target RKPD tahun 2021 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Seperti halnya tahun 2021, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi covid-19. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah:

1. Pagu anggaran perangkat daerah mendasari pagu tahun 2021 yang telah ditetapkan dikurangi 10% dari pagu tahun 2021 dan pagu pengadaan yang telah selesai dilaksanakan;
2. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Kegiatan rutin usulan perangkat daerah untuk tahun 2022;
4. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
5. Kegiatan dari dana PIK tahun 2019 dan 2020;
6. Kegiatan yang bersifat perlindungan social, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dukungan untuk penanganan pandemi covid-19 lainnya;
7. Kegiatan pemulihan dibidang kesehatan melalui kegiatan pendampingan vaksinasi lanjutan selama pandemi covid-19.

Belanja daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.704.982.031.000,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.944.954.380.635,00, belanja modal sebesar Rp232.306.990.365,00, belanja tidak terduga sebesar Rp22.000.000.000,00, serta belanja transfer sebesar Rp505.720.660.000,00. Kinerja keuangan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan APBD tahun 2021 sebagai dampak pandemi covid-19 serta proyeksi belanja daerah tahun 2022 dan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN						
		R. 2018	R. 2019	R. 2020	2021*)	2021**)	Proyeksi/Target 2022	Proyeksi/Target 2023
2	BELANJA	2.575.620.503.042	2.717.431.598.854	2.010.868.784.570	2.894.606.723.000	2.962.281.307.000	2.704.982.031.000	2.807.046.290.000
2.1	BELANJA OPERASI	1.705.253.631.133	1.776.068.220.040	1.683.573.672.389	1.909.075.538.700	1.989.263.018.510	1.944.954.380.635	1.857.233.606.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.108.018.481.665	1.133.760.553.898	1.068.550.795.583	1.154.730.222.767	1.136.940.715.222	1.176.897.631.294	1.194.730.222.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.494.743.020	578.593.810.142	571.116.366.806	675.445.620.933	781.754.485.538	696.068.699.821	595.497.784.000
2.1.3	Belanja Hibah	92.476.109.948	39.818.765.000	38.230.180.000	75.121.695.000	65.100.817.750	66.385.049.520	63.227.600.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	20.264.296.500	23.895.091.000	5.676.330.000	3.778.000.000	5.467.000.000	5.603.000.000	3.778.000.000
2.2	BELANJA MODAL	417.983.021.935	434.393.482.658	248.977.818.850	471.865.524.300	459.332.628.490	232.306.990.365	434.949.154.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.136.076.000	1.500.000	78.317.293.331	10.000.000.000	19.000.000.000	22.000.000.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	448.247.773.974	506.968.396.156	494.671.164.849	503.665.660.000	494.685.660.000	505.720.660.000	504.863.530.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	9.012.448.100	8.243.113.740	10.151.562.329	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	16.197.870.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	439.235.325.874	498.725.282.416	484.519.602.520	488.665.660.000	479.685.660.000	490.720.660.000	488.665.660.000

Sumber: Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

*) APBD Penetapan Tahun 2021

**) Proyeksi/Target Perubahan APBD Tahun 2021

**Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi	65,36	67,2	67,16	2.82
2.2	Belanja Modal	15,99	9,93	15,5	(37,9)
2.3	Belanja Tidak Terduga	0	3,13	0,64	-
2.4	Belanja Transfer	18,65	19,74	16,7	5,84

Sumber: Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, tercantum proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan mendasari kondisi riil akibat dampak pandemi covid-19. Adapun untuk proyeksi belanja dan pembiayaan sangat dipengaruhi dengan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi covid-19.

Secara umum, belanja daerah tahun 2022 pada dokumen Perubahan RPJMD sebesar Rp2.802.714.366.000,00 lebih besar Rp97.732.335.000,00 dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2022 pada Rancangan RKPD Tahun 2022 sebesar Rp2.704.982.031.000,00. Selisih tersebut paling besar berasal dari belanja modal. Hal ini berkaitan dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik yang tidak dimasukkan dalam rancangan RKPD Tahun 2022.

Pembiayaan daerah dalam rancangan RKPD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.000.000,00. Dimana penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah mengalami kenaikan. Pemberian pinjaman daerah sebagai salah satu kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19.

**Tabel 3.9 Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2022**

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	Keterangan
A	Belanja	2.802.714.366.000	2.704.982.031.000	(97.732.335.000)	
	BELANJA OPERASI	1.842.233.606.000	1.944.954.380.635	102.720.774.635	
	Belanja Pegawai	1.174.730.222.000	1.176.897.631.294	2.167.409.294	
	Belanja Barang dan Jasa	600.497.784.000	696.068.699.821	95.570.915.821	
	Belanja Hibah	63.227.600.000	66.385.049.520	3.157.449.520	
	Belanja Bantuan Sosial	3.778.000.000	5.603.000.000	1.825.000.000	
	BELANJA MODAL	445.867.524.000	232.306.990.365	(213.560.533.635)	
	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	22.000.000.000	12.000.000.000	
	BELANJA TRANSFER	504.613.236.000	505.720.660.000	1.107.424.000	
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	15.947.576.000	15.000.000.000	(947.576.000)	
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	488.665.660.000	490.720.660.000	2.055.000.000	
B	Pengeluaran Pembiayaan	42.500.000.000	46.500.000.000	4.000.000.000	
	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	11.500.000.000	1.500.000.000	

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD Tahun Rencana	Selisih	Keterangan
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	
	Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat	2.760.214.366.000	2.658.482.031.000	(101.732.335.000)	

Sumber: Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2021

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 adalah Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2022 adalah:

1. Penyertaan modal Bank Jateng, PDAM dan BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT BPD Jawa Tengah dan BUMD
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong sebagai wujud pemulihan ekonomi dalam masa pandemi covid-19 untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.
3. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kinerja keuangan dari sektor pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan APBD tahun 2021 sebagai dampak pandemi covid-19 serta proyeksi pembiayaan tahun 2022 dan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN						
		R. 2018	R. 2019	R. 2020	2021*)	2021**)	Proyeksi/Target 2022	Proyeksi/Target 2023
3	PEMBIAYAAN DAERAH	111.098.862.487	50.685.997.599	71.864.208.527	123.150.000.000	211.096.097.000	114.261.115.000	49.954.725.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	119.976.862.486	60.034.997.599	88.993.266.248	130.150.000.000	218.096.097.000	160.761.115.000	89.954.725.000
3.1.1	Penggunaan SILPA	106.925.093.495	59.879.097.966	0	130.150.000.000	218.096.097.000	160.761.115.000	89.954.725.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	12.840.541.100	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	211.227.891	155.899.633	109.842.755	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.878.000.000	9.349.000.000	17.238.900.476	7.000.000.000	7.000.000.000	46.500.000.000	40.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	30.000.000.000	30.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	8.849.000.000	9.349.000.000	15.849.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	11.500.000.000	10.000.000.000
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	2.500.000.000	2.500.000.000	5.000.000.000	0
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	1.389.900.476	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	29.000.000	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	111.098.862.486	50.685.997.599	71.864.208.527	123.150.000.000	211.096.097.000	114.261.115.000	49.954.725.000

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

*) APBD Penetapan Tahun 2021

***) Proyeksi APBD Perubahan Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja hibah ataupun belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus. Akan tetapi, dengan masuknya belanja pegawai pada program dan kegiatan perangkat daerah, maka belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat tidak mencantumkan belanja pegawai sebagai bagian dari belanja dan pengeluaran wajib dan mengikat.

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	Tahun 2021	Proyeksi 2022
1	BELANJA TRANSFER	503.665.660.000	505.720.660.000
1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	15.000.000.000	15.000.000.000
1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	488.665.660.000	490.720.660.000
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	22.000.000.000
2.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	22.000.000.000
3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000	46.500.000.000
3.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0
3.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000	11.500.000.000
3.3	Pembentukan Dana Cadangan		30.000.000.000
3.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	5.000.000.000
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA BELANJA		520.665.660.000	574.220.660.000

Sumber : Bappeda & Litbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2022
1	PENERIMAAN DAERAH	2.751.482.031.000
1.1	PENDAPATAN DAERAH	2.590.720.916.000
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	436.954.456.000
1.1.2	Pendapatan Transfer	2.002.436.660.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	151.329.800.000
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.761.115.000
1.2.1	SILPA	160.761.115.000
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.2.3	Penerimaan Piutang Daerah	0
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	574.220.660.000
2.1	Belanja Transfer	505.720.660.000
2.2	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000
2.3	Pengeluaran Pembiayaan	46.500.000.000
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)		2.177.261.371.000

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.177.261.371.000,00 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja SKPD dalam RKPD tahun 2022 adalah sebesar Rp1.536.801.711.000,00 sebagai Prioritas III.

Tabel 3.14 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2022
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	527.720.660.000
1.1	Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar	527.720.660.000
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	112.739.000.000
2.1	Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah	112.739.000.000
3	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III	1.536.801.711.000
3.1	Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	1.536.801.711.000
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2+3)	2.177.261.371.000

Sumber : Bappeda & Litbang Kabupaten Tegal, 2021